

**IDENTIFIKASI ALUR DISTRIBUSI TATA NIAGA DALAM
PEMBENTUKAN HARGA GABAH ATAU BERAS
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan
Prambon Kabupaten Nganjuk)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Khilla Isnanabila
135020501111011**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**IDENTIFIKASI ALUR DISTRIBUSI TATA NIAGA DALAM
PEMBENTUKAN HARGA GABAH ATAU BERAS PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Prambon Kabupaten
Nganjuk)**

Yang disusun oleh :

Nama : Khilla Isnabila
NIM : 135020501111011
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 2 Maret 2017

Malang, 6 Maret 2017

Dosen Pembimbing,



Ajeng Wahyu Puspitasari, SE., MA.

NIP. 2013048605212001

IDENTIFIKASI ALUR DISTRIBUSI TATA NIAGA DALAM PEMBENTUKAN HARGA GABAH ATAU BERAS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)

Khilla Isnanabila
Ajeng Wahyu Puspitasari, SE., MA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang
Email : khillaisnanabila@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur distribusi tata niaga gabah atau beras dan pengaruh alur tersebut terhadap pembentukan harga gabah atau beras dalam sudut pandang ekonomi Islam di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini berdasarkan teori permintaan dan penawaran, teori penetapan harga dan teori kelembagaan baik dari segi konvensional dan ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menggunakan informan penelitian dari 2 petani dan 2 pelaku tata niaga yang berada di daerah Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Salah satu hasil dari penelitian didapat bahwa semakin panjangnya alur membuat jumlah penerimaan petani rendah. Rendahnya penerimaan petani dikarenakan beberapa faktor, diantaranya kurangnya informasi yang didapat petani dan pengetahuan mengenai pengelolaan padi yang kurang.

Kata kunci: tata niaga padi, alur distribusi gabah atau beras, pembentukan harga, harga islam

ABSTRACT

This study aims to understand the distribution channel of grain or rice and the effect of this flow on the price setting of grain or rice in an Islamic economy in the District of Prambon Nganjuk. This study is based on supply and demand theory, pricing theory and institutional theory in terms of both conventional and Islamic economics. This research uses a qualitative method and case study approach that involve two farmers and two channel distributors in the District of Prambon Nganjuk. One of this research result is that the lengthier of the distribution channel, the lower of farmer's income. Low income of farmers are caused by several factors, including the lack of information about the current price and their ignorance on how to process rice.

Keywords: the marketing of rice, grain or rice distribution channel, price formation, price islam

A. PENDAHULUAN

Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran sektor pertanian pada pembangunan ekonomi dibuktikan dengan kontribusi dalam penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja dan merupakan sumber pendapatan utama masyarakat pedesaan yang mayoritas berprofesi sebagai petani, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Malian et al (2004) bahwa peranan sektor pertanian dalam perekonomian dapat dilihat melalui indikator permintaan akan beras yang setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sektor pertanian yang mampu menciptakan kesempatan kerja yang besar, kontribusi pendapatan agregat komoditas padi terhadap PDB yang tinggi. Sektor pertanian juga menjadi sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan. Peningkatan kontribusi sektor pertanian telah terancang dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian (RENSTRA) tahun 2015-2019. Mengingat dalam program kerja kedepannya sektor pertanian ini akan diusung untuk mampu berkontribusi dalam membangun perekonomian Indonesia.

Laju pertumbuhan sektor pertanian dalam PDB triwulan II tahun 2016 sebesar 11,90% terhadap triwulan I tahun 2016. Sedangkan sektor industri pengolahan hanya mengalami laju

pertumbuhan 3,63%. Sektor pertanian dalam produktifitas padi pada tahun 2010-2014 meningkat rata-rata sebesar 1,63% per tahun. Begitu juga dengan jagung dan kedelai. Meskipun rata-rata jumlah produktifitas jagung lebih sedikit dibandingkan dengan padi dan kedelai. Pemicu meningkatnya produktifitas padi dikarenakan peningkatan luas lahan seluas 540 ribu Ha. Penyumbang terbesar produksi sektor pertanian berasal dari Pulau Jawa. Peningkatan produksi padi di Pulau Jawa terlihat signifikan dibandingkan dengan produksi Luar Jawa. Tidak hanya produksi padi, namun jagung dan kedelai di Pulau Jawa juga mengalami peningkatan sebesar 0,008% untuk pertumbuhan padi di Jawa, 2,94% pertumbuhan jagung dan 3,49% pertumbuhan kedelai. Peningkatan yang signifikan diimbangi dengan luas lahan yang berhasil diproduksi dan jumlah permintaan yang terus meningkat, baik permintaan dalam Pulau Jawa maupun permintaan di luar Pulau Jawa.

Adanya peningkatan dalam produksi padi untuk memenuhi kebutuhan permintaan akan beras belum diimbangi dengan regulasi yang mengatur tata niaga padi oleh Pemerintah daerah Nganjuk dan hanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tata niaga padi ialah kegiatan yang melingkup perpindahan barang dari produsen sampai konsumen termasuk proses-proses di dalamnya. Tata niaga dapat dikatakan efisien jika harga yang terjadi di dalam tata niaga adil bagi pihak yang terlibat. Belum adanya regulasi tata niaga dalam proses produksi gabah atau padi menjadikan beberapa pihak yang terlibat mendapatkan ketimpangan harga. Di sisi lain, kurangnya pemberdayaan petani terkait penyediaan gudang penyimpanan yang dapat dimanfaatkan petani.

Alur distribusi barang melalui tata niaga dalam komoditi padi di daerah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Prambon terbentuk dari beberapa lembaga diantaranya petani, tengkulak, penebas, penggilingan, gudang KUD (Koperasi Unit Desa), pasar, dan konsumen dalam dengan alur tata niaga yang telah ada di daerah Nganjuk sebagai berikut:

1. Petani → Konsumen
2. Petani → Penebas → Penggilingan → Konsumen
3. Petani → Penebas → Penggilingan → Tengkulak → Pasar → Konsumen
4. Petani → Gudang KUD → Tengkulak → Pasar → Konsumen

Penetapan harga untuk padi dilihat dari konsumsi beras setiap tahunnya mengalami kenaikan. Dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan potensi luas lahan agar tetap produktif dan menjaga harga akan gabah atau padi tetap stabil. Beberapa regulasi yang telah ditetapkan berfungsi untuk menjaga ketersediaan pangan khususnya gabah atau beras dan kestabilan harganya. Kebijakan dalam penetapan harga beras ini ditetapkan dengan menggunakan Harga Pokok Pembelian (HPP). Namun pada kenyataannya petani hanya bisa menjual hasil gabah atau beras kualitas standar dengan harga Rp 3.700 per Kg, dimana harga ini dibawah HPP yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan petani yang memproduksi gabah atau berasnya sendiri tidak mampu menjualnya langsung ke pasar, dikarenakan keterbatasan alat dan biaya untuk mengubah padi menjadi beras dan memilih menjual hasil produksinya kepada gudang KUD atau penggilingan langganan dengan risiko harga beli yang diterima petani jauh lebih rendah dibanding HPP Pemerintah. Beberapa alasan dibelinya gabah atau beras dengan harga lebih rendah oleh penggilingan dan gudang KUD ialah adanya biaya tambahan yang dikeluarkan guna memperoleh hasil produksi tersebut, seperti biaya transportasi, biaya pengilingan, biaya tenaga kerja, dan biaya produksi lainnya.

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori Permintaan dan Penawaran Konvensional

Tinggi rendahnya harga yang diterapkan pada pasar kompetitif akan dikendalikan oleh permintaan dan penawaran akan barang. Dimana permintaan yang berhubungan dengan pembeli dan penawaran yang berhubungan dengan dengan penjual. Saat pembeli dan penjual melakukan transaksi tawar-menawar akan harga suatu barang untuk mencapai kesepakatan harga, harga yang disepakati kedua belah pihak disebut dengan harga pasar. Menurut Mankiw (2012) Beberapa faktor yang menjadikan permintaan akan suatu barang naik atau turun ialah pendapatan, harga barang terkait, ekspektasi dan jumlah pembeli. Sedangkan faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran bertambah dan menurun ialah Harga input atau bahan baku, teknologi, perkiraan harga di masa depan dan jumlah penjual.

Teori Permintaan dan Penawaran Menurut Ekonomi Islam

Permintaan menurut Ibnu Taimiyah barang adalah hasrat terhadap sesuatu yang digambarkan dengan istilah *raghbah fi al-sya'i* (jumlah barang yang diminta). Secara global permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan permintaan konvensional. Prinsip yang membedakan antara keduanya ialah jenis barang yang dikonsumsi haruslah memiliki sifat halal dan *thayyib* (baik). Batas anggaran (*budget constrain*) yang telah mengatur tentang kemampuan seseorang dalam mengonsumsi sesuatu dilihat dari tingkat pendapatannya belum cukup membatasi seorang Muslim dalam melakukan konsumsinya. Batasan lain yang harus diperhatikan ialah mengonsumsi tidak berlebihan (*israf*) atau mengonsumsi sesuai dengan kebutuhannya dan mengutamakan kebaikan (*mashlahah*). Konsumsi dalam Islam tidak memperbolehkan permintaan akan barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, kemubadziran.

Konsumsi menurut pandangan Ekonomi Islam haruslah mengonsumsi barang halal dan *thayyib* sehingga menghasilkan tingkat *mashlahah* bukan untuk kepuasan pribadi atau *utility*. Dimana *mashlahah* dalam konsumsi bisa dihitung menggunakan pendekatan *mashlahah* marginal, sedangkan tingkat *mashlahah* yang tidak dapat dihitung namun hanya bisa dirasakan dapat menggunakan pendekatan *iso-mashlahah*.

Teori Penetapan Harga Konvensional

Dalam menetapkan harga yang berlaku terdapat tahap-tahap seperti : menentukan tujuan penetapan harga, memperkirakan permintaan akan barang dan elastisitas harganya, mengantisipasi reaksi dalam persaingan, menentukan pangsa pasar, memilih strategi harga untuk mencapai pasar sasaran, mempertimbangkan kebijakan pemasaran, memilih metode perhitungan harga, menetapkan tingkat harga dan menyesuaikan struktur harga terhadap permintaan dan biaya dimasing-masing segmen (Etzel et al (1997) dalam Dharmmesta (2014).

Kebijakan penetapan harga menurut Rahim (2010) pada petani pada umumnya dengan menetapkan tingkat harga dasar (*floor price*) di tingkat petani dan penetapan tingkat harga atap (*ceiling price*) di tingkat konsumen.

Teori Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam

Harga Islam menurut *fiqh* dikenal dengan dua istilah, *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* merupakan harga patokan sebuah barang sedangkan *as-si'r* harga yang berlaku di pasar. Kemudian *As-si'r* dibagi lagi menjadi 2 macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan Pemerintah. Harga ini terjadi secara alami di mekanisme pasar tanpa adanya campur tangan Pemerintah, karena adanya campur tangan Pemerintah dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang atau produsen. Kedua, harga berlaku suatu barang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan pertimbangan modal dan keuntungan yang wajar bagi pedagang atau produsen dengan melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat (Utomo, 2013).

Penetapan harga menurut Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim terbagi menjadi 2 macam. Pertama, penetapan harga yang bersifat *dhalim*, dikatakan *dhalim* dikarenakan pematokan harga yang dilakukan oleh Pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibatnya terbatasnya jumlah barang di pasar sehingga menjadi langka sementara permintaan terus meningkat. Harga yang *dhalim* ini bersifat merugikan produsen dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang. Kedua, penetapan harga secara adil. Yaitu penetapan yang dilakukan ketika terjadi lonjakan harga yang tajam atau signifikan yang disebabkan oleh para spekulan atau pedagang dengan mempertimbangkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, dan keuntungan bagi para produsen atau pedagang.

Teori Ekonomi Kelembagaan Pertanian

Biaya transaksi merupakan persoalan yang biasanya ada dalam ekonomi kelembagaan. Ekonomi biaya transaksi dapat dibedakan menjadi dua hal. Pertama, biaya transaksi komoditas, dimana biaya ini lebih mengarah pada pembelian dan penjualan komoditas barang dan jasa sebagaimana dilakukan dalam proses transaksional. Kedua, transaksi kelembagaan, biaya ini ada dalam desain pengembangan keteraturan, struktur, stabilitas, dan prediksi pada pengaturan proses pasar. segala macam faktor yang bisa menimbulkan biaya transaksi dalam suatu proses transaksi menimbulkan eksekusi hingga melakukan proses negosiasi, pengukuran, dan pemaknaan pertukaran. Teori ini menggunakan transaksi sebagai basis analisis, sedangkan teori neoklasik memakai produk sebagai dasar unit analisis (Greif, 1998 dalam Andriyani, 2015).

Selain biaya transaksi, Informasi asimetris merupakan salah satu penyebab terjadinya kegagalan pasar. misalnya informasi yang tidak dapat diperoleh oleh petani mengenai harga yang sedang berlangsung menjadikan petani mengalami kerugian, dan dalam keadaan ini bisa

dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan berlebih. Penyebab adanya informasi asimetris salah satunya ialah anggapan bahwa informasi memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga individu yang memiliki jiwa mementingkan diri sendiri tidak akan membagi informasinya kecuali jika mendapatkan keuntungan. Dalam praktik di bidang ekonomi pertanian pada praktik pemasarannya, informasi asimetris terjadi karena salah satu pihak tidak mengetahui harga ataupun kualitas barang baik dari pembeli maupun penjual, sehingga kesepakatan harga atas barang pertanian tersebut terjadi tidak efisien atau menguntungkan sebelah pihak. Selain informasi asimetris yang menjadi penyebab di bidang pertanian, perburuan rente atau rent-seeking juga menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di bidang pertanian.

Penelitian Terdahulu

Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Setiawan (2012) dalam Revitalisasi tata niaga beras dalam upaya mendorong kesejahteraan petani di Jawa Timur mengungkap beberapa permasalahan yang ada dalam pertaniannya. Diantaranya, jumlah stok padi tidak pernah mampu mencukupi jumlah permintaan akan beras dikarenakan tahap-tahap penanaman padi yang memakan banyak waktu dan biaya sebelum pemanenan. Permasalahan kedua yang sering terjadi pada pemasaran beras yang ada di Jawa Timur. Tata niaga yang telah terbentuk sedikitnya terdapat 3 alur tata niaga yang diantaranya dikuasi oleh tengkulak dan jenis pasar dengan persaingan tidak sempurna membuat petani mendapatkan harga penerimaan yang rendah.

Penelitian menurut Ariwibowo (2013) dalam Analisis Rantai Distribusi Komoditas Padi dan Beras Di Kecamatan Pati menjelaskan bahwa kurangnya kebijakan publik yang mengatur permodalan petani dan tata niaga petani menyebabkan petani tidak bisa menjual hasil produksinya secara langsung. Hal ini akan berakibatkan pada jumlah pendapatan yang diterima oleh petani tidak sebesar pedagang maupun penggilingan yang mampu menjual langsung kepada konsumen. Di Kecamatan Pati terdapat 3 alur distribusi yang ada dalam komoditas padi dan beras. Harga yang diterima petani relatif rendah dikarenakan ketidakterlibatan petani secara langsung dalam memasarkan hasil pertaniannya.

Menurut Yustiningsih (2012) dalam Analisis integrasi pasar dan transmisi harga beras petani-konsumen di Indonesia menyimpulkan bahwa jangka pendek transmisi harga gabah kering panen (GKP) terhadap harga bersifat simetris sedangkan dalam jangka panjang bersifat asimetris dikarenakan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pedagang perantara dan kesalahan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Kesalahan kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini kurang efektif dikarenakan sifat pasar yang terlalu terpaksa untuk produsen dan konsumen.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini ialah kesamaan dalam hal meneliti masalah penetapan harga oleh pemerintah. Selain itu, variabel yang digunakan sama-sama menggunakan petani padi dan beberapa menganalisis terkait konsumen. Perbedaan yang terlihat dalam penelitian ini dibanding dengan penelitian terdahulu diantaranya, belum ditemukan mengenai analisis alur distribusi tata niaga yang berpengaruh pada harga yang diperoleh serta belum ditemukannya analisis dalam harga bidang ekonomi islam.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini ingin meneliti persepsi dari pembuat kebijakan yang tidak memungkinkan untuk diteliti melalui angka-angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih guna untuk memperoleh hasil atau jawaban atas rumusan masalah yang ada. Studi kasus merupakan tipe pendekatan pada satu kasus yang berfokus pada sistem terkait. Tempat ini dipilih karena jumlah petani dan tengkulak yang ada di Kabupaten Nganjuk sebagian besar berada pada Kecamatan Prambon. Waktu yang digunakan guna mendapatkan informasi yang diperlukan selama 3-4bulan.

Unit Analisis dan Informan Penelitian

Unit analisis pada penelitian ini adalah kesesuaian penetapan harga gabah atau beras di Kabupaten Nganjuk. Penetapan harga gabah atau beras di Kabupaten Nganjuk dipilih sebagai unit analisis karena ditemukan adanya ketimpangan harga gabah atau padi yang terjadi di Kabupaten Nganjuk yang berdampak pada petani sebagai produsen. Dengan menggunakan informan yang berada di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk berjumlah 2 petani dan 2 pelaku tata niaga lainnya.

Jenis dan Sumber Data

Penggunaan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, data primer yang berasal dari petani dan tengkulak yang telah dipilih. *Kedua*, data sekunder yang berasal dari laporan yang disajikan BPS (Bapan Pusat Statistika), laporan Kementerian Pertanian, kebijakan pemerintah, studi literatur (berasal dari buku, jurnal, tesis, dan penelitian terdahulu) yang terkait dengan sistem penetapan harga gabah atau padi.

Teknik dan Metode Validasi Data

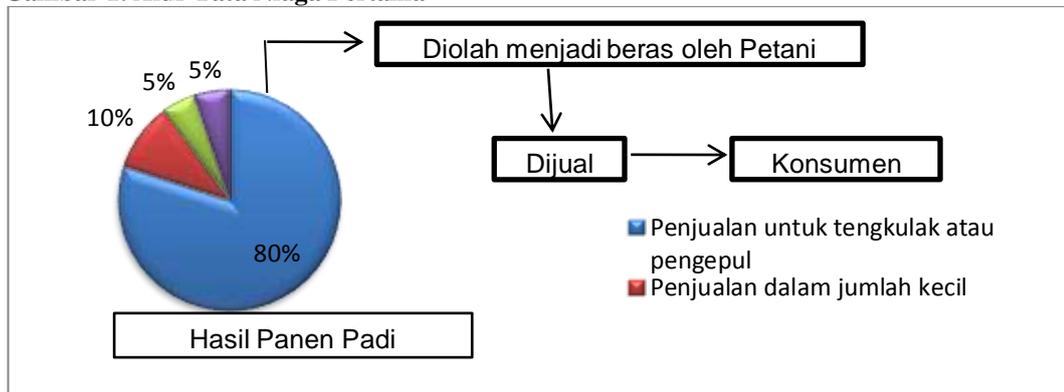
Teknik yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan metode: wawancara terbuka dan tertutup, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan pengujian data dengan beberapa metode triangulasi (sumber, teknik dan waktu), penggunaan bahan referensi, dan member check.

D. PEMBAHASAN

Alur Tata Niaga Pertanian

Alur pertama merupakan alur yang paling baik diantara alur distribusi yang lainnya. Hasil keseluruhan panen oleh petani yang diserahkan kepada penebas sebanyak 80% dari total panennya. 10% lainnya untuk dijual dalam jumlah yang kecil, 5% lainnya untuk dikonsumsi sendiri hingga panen selanjutnya tiba dan 5% lagi untuk benih bibit. Sebanyak 80% dari hasil panen diserahkan kepada penebas atau dalam hal ini orang yang membeli gabah langsung dari sawah. Beras yang mampu diharga oleh petani kepada konsumen secara langsung ialah sebesar Rp.8.500,- per Kg dengan jenis beras bramo. Harga yang ditawarkan oleh petani kepada konsumen untuk beras lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh tengkulak dan pedagang lainnya.

Gambar 1. Alur Tata Niaga Pertama



Sumber: Data Lapangan, 2016

Harga murah yang ditawarkan petani dikarenakan motif ingin menjual barang dengan dan penjualan yang dilakukan sebatas harga yang diberikan kepada tetangga. Jual beli yang dilakukan petani terhadap konsumen yang dekat dengan rumahnya dilakukan dengan motif sosial/membantu sesama. Dimana petani yang menjual beras langsung kepada konsumennya, tidak hanya berlandaskan motif ekonomi guna mencukupi kebutuhan dan kepuasan diri, melainkan juga untuk motif membantu sesama. Maka tidak salah jika harga yang ditawarkan oleh petani kepada konsumen langsung lebih murah dibandingkan dengan harga jual oleh pelaku tata niaga yang lainnya. Selain motif sosial yang dapat memperkuat sosialitas petani dengan masyarakat lainnya, keuntungan alur pertama yang digunakan, dapat melatih merubah pola pikir petani pedesaan untuk mempelajari cara pengelolaan gabah sawah menjadi beras. Jika petani telah memiliki pola pikir yang baik dalam pengelolaan, maka jumlah penerimaan petani akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan hanya menerima penjualan gabah sawah. Namun kendala yang sering ditemukan oleh petani dalam melakukan proses pengelolaan ialah

1. Keterbatasan informasi mengenai pengelolaan gabah menjadi beras
2. Tingginya biaya dan teknologi yang digunakan

3. Petani tidak ingin bersusah payah dalam mengolah hasil panen padi

Pada umumnya petani pedesaan kurang memiliki sikap produksi dan ingin mengembangkan manajemen produksinya. Petani pedesaan yang selama ini hanya terfokus pada produksi di ladang dan belum terlibat secara langsung dalam kegiatan agribisnis pemasaran hasil outputnya, menjadikan pola pikir petani tidak berkembang. Hal ini juga tercermin bahwa kelembagaan yang seharusnya bisa digunakan untuk wadah organisasi seperti kembali hidupnya fungsi gapoktan/poktan belum bisa maksimal dilakukan. Permasalahan pokok yang terletak pada petani selain teknologi, pengetahuan dan informasi yang kurang didapat oleh petani, lemahnya tawar-menawar petani dengan pelaku ekonomi yang lain.

Dalam beberapa alur yang terdapat di Kecamatan Prambon, alur pertama yang merupakan alur terpendek ialah alur yang paling baik dibandingkan dengan alur yang lainnya. Baiknya alur ini dibanding alur yang lain dikarenakan jumlah penerimaan petani yang tinggi dibanding menggunakan alur yang lainnya. Selain itu, dalam alur ini petani akan mampu mengembangkan pola pikir sebagai produsen untuk mampu mengolah hasil pertaniannya menjadi barang yang siap dikonsumsi. Sehingga selain menjadi produsen sawah, petani akan mampu menjual hasil pertaniannya sendiri dan informasi mengenai pasar, harga, kebijakan dan jenis-jenis pembiayaan yang diperlukan dapat diketahui.

Permasalahan Kelembagaan Tata Niaga Pertanian

Kelembagaan tata niaga beras yang ada di Kecamatan Prambon memegang peran penting dalam hal distribusi produk pertaniannya. Namun potensi kelembagaan tata niaga ini belum sepenuhnya bekerja maksimal dalam praktiknya. Hal ini dikarenakan sifat dari kelembagaan yang digunakan petani pedesaan bersifat informal. Belum adanya kebijakan yang mengatur kelembagaan yang bersifat informal membuat beberapa hambatan dalam tata niaga menghambat jalannya sistem tersebut. Berikut mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di kelembagaan tata niaga beras di Kecamatan Prambon. Berikut mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di kelembagaan tata niaga beras di Kecamatan Prambon

1) Lemahnya Posisi Tawar-Menawar Petani

Keberagaman kelembagaan pertanian memiliki titik strategis dalam rangka peningkatan nilai kesejahteraan petani dengan meningkatkan posisi tawar-menawar yang tinggi. Posisi tawar-menawar antara petani dengan pelaku tata niaga lainnya akan menentukan hasil yang didapat oleh petani. Secara umum, posisi tawar-menawar petani sebagai produsen masih lemah diantara pelaku tata niaga yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan ketrampilan, dan kurangnya sarana prasarana mengenai informasi pasar. Sehingga faktor-faktor tersebut menjadikan petani memiliki posisi tawar-menawar yang rendah dan bergantung pada harga yang ditetapkan oleh tengkulak (Setiawan, 2012).

Petani dalam melakukan hal tawar-menawar sering kali mengalami kalah. Dimana sisi penawaran tidak lagi diperhatikan karena sisi permintaan lebih dominan. Petani selalu mengalami kekalahan dalam berhadapan dengan pelaku ekonomi lain yang mengakibatkan kesepakatan kelembagaan (institutional arrangement) dan lingkungan kelembagaan (institutional environment) yang tidak dapat mencerminkan asas keadilan (Yustika, 2009).

2) Panjangnya Alur Distribusi Mengakibatkan Rendahnya Penerimaan Petani

Alur distribusi tata niaga pemasaran beras memiliki tujuan akhir yang akan diterima oleh setiap pelaku tata niaga. Harga merupakan salah satu tujuan yang diperoleh oleh masing-masing pelaku tata niaga. Dalam komoditas pertanian, khususnya padi memerlukan distribusi yang panjang untuk hasil pertanian sampai kepada tangan konsumen. Panjangnya alur distribusi dikarenakan adanya keterbatasan biaya, tenaga dan mesin untuk mengolah komoditas menjadi suatu produk yang memiliki nilai lebih tinggi. Semakin tinggi mesin, tenaga dan biaya lainnya yang digunakan dalam produksi gabah atau padi, maka nilai akhir yang akan didapat akan semakin tinggi pula. Oleh karena itu, semakin panjangnya rantai distribusi akan menyebabkan petani sebagai rantai terendah mendapatkan nilai yang kecil dibandingkan dengan pelaku dengan rantai terdekat dengan konsumen.

3) Informasi Asimetris

Permasalahan tata niaga yang sering terjadi di sektor pertanian dikarenakan assymetric information antara petani dan pelaku tata niaga yang lain mengenai harga dan tempat dimana petani dapat menjual langsung gabah atau beras yang dihasilkan. Dimana nantinya petani dapat

memperoleh harga lebih tinggi daripada harga yang diberlakukan oleh tengkulak. Penentuan harga beli gabah antara satu tengkulak dengan tengkulak yang lain sering kali tidak sama, harga yang ditentukan tengkulak sudah tidak lagi melihat harga yang berlaku di pasaran. Petani dalam memperoleh penerimaan hasil penjualan sering kali juga tidak melihat harga di pasaran yang sedang berlaku. Hal ini lantaran didasarkan pada cepat membusuknya produk pertanian. Oleh karena itu jumlah besarnya penerimaan petani tidak menjadi hal yang penting.

Alasan rendahnya penerimaan petani dalam menjual hasil pertanian ialah adanya biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pihak tengkulak atau pengepul untuk memperoleh barang tersebut. Biaya tambahan tersebut berupa biaya tenaga kerja untuk mengangkut barang dan biaya transportasi. Infrastruktur yang belum terbangun baik ini menjadi hambatan petani dalam memperoleh harga jual yang tinggi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam mendistribusikan produk hasil gabah atau beras dari petani dibutuhkan beberapa pelaku tata niaga, yaitu: petani, penebas, penggilingan, tengkulak atau pengepul, dan gudang KUD. Dengan membentuk 4 alur yang tersedia sebagai berikut:

1. Alur pertama : petani → konsumen
2. Alur kedua : petani → penebas → penggilingan → konsumen
3. Alur ketiga : petani → penebas → penggilingan → tengkulak → konsumen
4. Alur keempat : petani → gudang KUD → tengkulak → konsumen

Sedangkan permasalahan yang terdapat dalam tata niaga beras yang ada di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ialah :

1. Kurang berjalannya lembaga formal pemerintah untuk bidang pertanian di Kecamatan Prambon membuat beberapa kebijakan yang terkait harga dan fungsi lembaga tidak berjalan semestinya. Penentuan harga ditentukan oleh pihak tengkulak dan gudang KUD mengingat jumlah pengelolaan beras lebih sedikit dibanding petani sebagai produsen. Gapoktan atau poktan yang seharusnya berjalan untuk meminimalisasi rendahnya penerimaan petani tidak berjalan dikarenakan kurangnya kebijakan yang mengatur mengenai gapoktan atau poktan.
2. Semakin panjangnya alur distribusi yang dilakukan oleh petani akan menyebabkan jumlah penerimaan petani semakin rendah yaitu sebesar Rp. 3.700,- per Kg. Jika petani mampu menjual hasil pertanian berupa beras (dengan melakukan proses produksi) maka hasil yang diterima sebesar Rp. 8.500,- per Kg. Namun petani yang menjual langsung ke konsumen berjumlah sedikit, dikarenakan kurangnya keterbatasan informasi mengenai pasar, teknologi atau mesin untuk mengolah gabah menjadi beras, dan kurangnya pengetahuan petani mengenai pengelolaan gabah. Jumlah penerimaan petani sangat rendah jika hanya menjual hasil pertanian berupa gabah.

Saran

Berdasarkan pada hasil temuan yang sudah dilakukan di lapangan, maka peneliti melihat perlu beberapa saran perbaikan pada level teoritis dan aplikasi lapangan.

1. Perlu adanya campur tangan langsung Pemerintah dalam pengawasan pasar untuk menyeimbangkan kekuatan penawaran dan permintaan pasar, informasi mengenai pasar, besaran penerimaan, dan pengetahuan untuk mengurangi adanya pelaku rente.
2. Agar penerimaan petani meningkat, maka diperlukan adanya penyuluhan terkait pengelolaan gabah menjadi beras seperti yang dilakukan oleh tengkulak, pengelolaan pasca panen dan menghidupkannya kembali fungsi gapoktan atau poktan agar petani memiliki informasi dan pengetahuan. Sehingga jumlah penerimaan petani dapat meningkat dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan dapat mengubah pola pikir petani yang menginginkan barang terjual tanpa memandang besaran penerimaan.
3. Pengawasan yang intensif baik dari tingkat Kabupaten maupun pedesaan untuk mengawasi pelaku tata niaga lainnya (distributors) untuk melakukan penyelewengan harga dan proses produksi.
4. Pengenalan lebih lanjut kepada petani pedesaan yang ada di Kecamatan Prambon mengenai pembiayaan salam dan penjemputan langsung pembiayaan tersebut sehingga sistem peminjaman modal ijon dapat dihapuskan

F. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistika Jawa Timur. 2015. Produksi Padi dan Palawija (Angka Tetap 2014 dan Angka Ramalan I 2015)
- Badan Pusat Statistika Nganjuk. 2014. Produksi Padi dan Palawija
- Badan Pusat Statistika Nganjuk. 2015. Kabupaten Nganjuk Dalam Angka Tahun 2015
- Badan Pusat Statistika Nganjuk. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nganjuk 2011-2015 Tahun Dasar 2015.
- Badan Pusat Statistika. 2013. Sensus Pertanian
- Boediono. 2011. Ekonomi Mikro Ed. 2. Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI No. 008
- Bungin, Burhan. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dharmmesta, Baru Swastha. 2014. Strategi Penetapan Harga. Modul 7
- Direktorant Pangan dan Pertanian, Bappenas. 2014. Rencana Pembangunann Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Pangan dan Pertanian 2015-2019.
- Malian, A. husni, Sudi Mardianto dan Mewa Ariani. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi, Konsumsi dan Harga Beras serta Inflasi Bahan Makanan. Jurnal Argo Ekonomi, Vol. 22 (No. 2): 119-146
- Mankiw, N. Gregory dan Euston Quah Peter Wilson. 2012. Pengantar Ekonomi Mikro: Principle Of Economics An Asian Edition Vol. 1. Jakarta: Salemba Empat
- Rahim, Manat. 2010. Dampak Kebijakan Harga dan Impor Beras terhadap Nilai Tukar Petani di Pantai Utara Jawa Barat. Trikonomika, Vol. 9 (No. 1): 29-36
- Setiawan, Budi. 2012. Revitalisasi Tata Niaga Beras Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Petani Di Jawa Timur. Disertasi tidak diterbitkan. Malang Ekonomi dan Bisnis UB
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. Fiqih Aktual. Jakarta: Gema Insani
- Yustika, Ahmad Erani. 2013. Ekonomi Kelembagaan : Paradigman, Teori, dan Kebijakan. Jakarta: Erlangga.
- Yustiningsih, Firdaussy. 2012. Analisis Integrasi Pasar dan Transmisi Harga Beras Petani-Konsumen Di Indonesia. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: UI